

KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGENDALIAN HARGA BAHAN POKOK: STUDI KASUS SURABAYA DENGAN NGANJUK, MOJOKERTO, DAN BLITAR

Oleh:

Dea Kayana Faradila¹
Fransisca Diana Putri²
Natasha Anggita Saputri³
Revienda Anita Fitri⁴

Universitas Negeri Surabaya

Alamat: JL. Ketintang No. i8, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur
(60231).

Korespondensi Penulis: dea.23121@mhs.unesa.ac.id,
fransisca.23132@mhs.unesa.ac.id, natasha.23133@mhs.unesa.ac.id,
reviendafitrie@unesa.ac.id

Abstract. *The increase in staple food prices has become a strategic issue that affects economic stability and community welfare. This article discusses inter-regional cooperation between Surabaya City and Nganjuk, Mojokerto, and Blitar Regencies in controlling the price of basic commodities. This research aims to analyze inter-regional cooperation in controlling the price of basic commodities between Surabaya City and Nganjuk, Mojokerto, and Blitar Regencies. The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach, collecting data from scientific journals, policy documents, and trusted media sources. The results show that this cooperation plays a significant role in stabilizing the price and supply of basic commodities through technical coordination, integrated supply chains, and direct links between producers and markets. The effectiveness of the cooperation is reflected in reduced price fluctuations, improved farmer welfare, and distribution efficiency. However, challenges such as the lack of a strong institutional framework and integrated information system remain.*

KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGENDALIAN HARGA BAHAN POKOK: STUDI KASUS SURABAYA DENGAN NGANJUK, MOJOKERTO, DAN BLITAR

Overall, this cooperation not only supports regional food security but also contributes to sustainable development (SDGs), particularly in ensuring access to affordable and nutritious food for the people.

Keywords: *Inter-Regional Cooperation, Price Control, Staple Food, Food Security, Supply Chain.*

Abstrak. Kenaikan harga bahan pokok menjadi isu strategis yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini membahas kerja sama antardaerah antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Nganjuk, Mojokerto, dan Blitar dalam mengendalikan harga bahan pokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama antardaerah dalam pengendalian harga bahan pokok antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Nganjuk, Mojokerto, dan Blitar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan sumber media terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ini berperan signifikan dalam menstabilkan harga dan pasokan bahan pokok melalui koordinasi teknis, rantai pasok terintegrasi, dan hubungan langsung antara produsen dan pasar. Efektivitas kerja sama tercermin dari penurunan fluktuasi harga, peningkatan kesejahteraan petani, dan efisiensi distribusi. Namun, tantangan seperti kurangnya kerangka kelembagaan yang kuat dan sistem informasi terpadu masih menjadi hambatan. Secara keseluruhan, kerja sama ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan regional tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam menjamin akses pangan yang terjangkau dan bergizi bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kerja Sama Antardaerah, Pengendalian Harga, Bahan Pokok, Ketahanan Pangan, Rantai Pasok.

LATAR BELAKANG

Kerja sama daerah (KAD) merupakan alat untuk memperkuat hubungan dan ikatan antar daerah dalam bingkai NKRI. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 tentang daerah pasal 195 terkatub tentang kebutuhan kerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui efektifitas dan efisienasi pelayanan publik dimana bunyi pasal 195 ayat 1 adalah “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah

dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan (I. Putra, 2013). Stabilitas harga bahan pokok merupakan faktor krusial dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi regional. Fluktuasi harga yang terjadi seringkali dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, gangguan distribusi, serta faktor eksternal seperti inflasi dan gejolak pasar global.

Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan harga bahan pokok menjadi tantangan utama dalam perekonomian di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Surabaya, sebagai kota metropolitan dengan tingkat konsumsi yang tinggi memerlukan strategi alternatif untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui kerja sama antardaerah dengan wilayah yang memiliki

surplus produksi pangan, yakni Nganjuk, Mojokerto, dan Blitar. Kolaborasi ini melibatkan penyederhanaan sistem logistik, serta penetapan harga secara langsung antara pedagang dan konsumen.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya menekan inflasi, langkah konkret yang tengah dilakukan dengan Kota Blitar adalah kerja sama dalam memasok telur dan sayur. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, Pemkot Surabaya melalui dinas terkait sedang melakukan pendataan menyeluruh terkait kebutuhan telur di berbagai sektor, mulai dari hotel, pasar, hingga rumah makan yang berada di Kota Pahlawan. Pendataan ini untuk mengetahui volume kebutuhan harian, serta harga yang sesuai dengan masyarakat.

"Jadi kami sudah melakukan kerja sama dengan Blitar, salah satunya adalah pemenuhan telur dan sayur. Tapi hari ini kita mendata semuanya yang ada di hotel, pasar, dan rumah makan terkait kebutuhannya. Sehingga kami akan langsung kerjasama dengan Blitar Raya, dengan itu akan dapat harga lebih bagus, lebih kompetitif karena langsung dari pedagangnya (Jatim Newsroom, 17/4/2025)," ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Konsep kerja sama antardaerah mengacu pada kolaborasi lintas wilayah untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat ditangani secara parsial. Dalam konteks pengendalian harga pangan, kerja sama semacam ini dapat dikaitkan dengan teori jaringan antar pemerintah (*Intergovernmental Network*) yang dikemukakan oleh Agranoff dan McGuire (2003), di mana kolaborasi dan koordinasi menjadi kunci dalam

KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGENDALIAN HARGA BAHAN POKOK: STUDI KASUS SURABAYA DENGAN NGANJUK, MOJOKERTO, DAN BLITAR

pengelolaan sumber daya bersama. Selain itu, stabilitas harga merupakan bagian dari agenda ketahanan pangan sebagaimana dijelaskan oleh FAO (2006) yang menyatakan bahwa ketahanan pangan dicapai jika pangan tersedia, dapat diakses, dan dikonsumsi dalam jumlah dan kualitas yang cukup. Rantai pasok yang efisien juga sangat penting dalam menjaga nilai ekonomi dan mengurangi disparitas harga antar wilayah.

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kerja sama antardaerah dalam pengendalian harga bahan pokok antara Surabaya dan tiga kabupaten mitra, menganalisis peran masing-masing daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok, serta menilai efektivitas kerjasama tersebut terhadap ketersediaan, keterjangkauan harga, dan kesejahteraan pelaku produksi.

KAJIAN TEORITIS

Kerja sama antar daerah merupakan bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pelayanan publik lintas wilayah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kerja sama daerah dapat dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, baik bersifat wajib maupun pilihan. Kerja sama ini dapat mencakup bidang ekonomi, infrastruktur, kesehatan, hingga stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok. Bentuk kerja sama bisa bersifat formal melalui nota kesepahaman (MoU) maupun informal berdasarkan hubungan historis atau kebutuhan strategis.

Berkaitan dengan dinamika harga, menurut Syafii A, dkk (2020) menyatakan bahwa mekanisme pasar merupakan proses alami perubahan harga yang terjadi hingga tercapainya titik keseimbangan dalam pasar bebas. Keseimbangan pasar yang dimaksud adalah kondisi di mana jumlah barang atau produk yang ditawarkan sebanding dengan jumlah permintaan yang ada. Oleh karena itu, dalam upaya mengendalikan harga, pemerintah memiliki peran strategis melalui penerapan berbagai kebijakan, seperti pelaksanaan operasi pasar, penyaluran langsung barang, pemberian subsidi harga, serta menjalin kerja sama antara daerah produsen dan daerah konsumen. Adapun terkait mengenai kestabilan harga, konsep stabilitas harga berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menjaga agar harga kebutuhan pokok tidak mengalami lonjakan drastis

yang berdampak pada daya beli masyarakat. Ketahanan pangan sendiri mencakup tiga dimensi utama: ketersediaan, aksesibilitas, dan konsumsi.

Dengan demikian, sinergi antara produsen dan konsumen melalui kerja sama antar daerah diyakini dapat meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok dan memperkuat ketahanan pangan daerah (FAO, 2006). Lebih lanjut, kerja sama antar daerah dalam hal pengendalian harga sangat erat kaitannya dengan teori rantai pasok atau biasa disebut *supply chain*. Menurut P. Tyagi (2014), rantai pasok merupakan suatu sistem di mana organisasi mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen. Rantai ini juga mencakup jaringan organisasi yang saling terhubung dan bekerja sama dengan tujuan bersama, yaitu mengelola proses pengadaan serta penyaluran barang secara optimal. Sementara itu, ketahanan pangan menurut FAO yang menyatakan bahwa ketahanan sebagai suatu keadaan di mana setiap individu, kapan pun, memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang memadai, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi harian mereka sesuai dengan preferensi masing-masing. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pangan secara adil dan merata menjadi fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan kerja sama antar daerah juga mendukung pemerataan pembangunan. Daerah produsen mendapatkan pasar yang jelas dan adil, sementara daerah konsumen memperoleh pasokan yang stabil dan harga yang terjangkau. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah daerah diharapkan memainkan peran aktif dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Kerja sama lintas wilayah, termasuk dalam pengelolaan pasokan bahan pokok, menjadi salah satu strategi operasional yang diandalkan dalam mencapai target tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur untuk menganalisis kerja sama antardaerah dalam pengendalian harga bahan pokok. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial-politik dan ekonomi yang kompleks, khususnya dalam konteks hubungan antarpemerintah daerah. Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis data sekunder dari berbagai sumber akademis dan kebijakan secara komprehensif.

KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGENDALIAN HARGA BAHAN POKOK: STUDI KASUS SURABAYA DENGAN NGANJUK, MOJOKERTO, DAN BLITAR

Sumber data penelitian meliputi tiga jenis utama: (1) jurnal ilmiah yang diakses melalui Google Scholar, Scopus, dan Sinta; (2) dokumen kebijakan pemerintah; serta (3) berita dan laporan media terpercaya untuk melihat perkembangan terbaru. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis dengan kata kunci tertentu seperti “kerja sama antar daerah,” “pengendalian harga pangan,” “ketahanan pangan,” dan “supply chain pemerintah daerah.” Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain tidak melibatkan data primer dan kemungkinan adanya bias publikasi. Namun, pendekatan studi literatur yang sistematis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika kerja sama antardaerah dalam stabilisasi harga pangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kerja Sama Antar Daerah

Hasil penelitian melalui studi literatur menunjukkan bahwa kerja sama antara Kota Surabaya dengan daerah-daerah penghasil bahan pangan seperti Nganjuk, Mojokerto, dan Blitar telah menjadi strategi yang cukup efektif dalam pengendalian harga bahan pokok. Kerja sama ini pada umumnya dilakukan dalam bentuk koordinasi teknis antar instansi, baik secara formal melalui nota kesepahaman maupun secara informal berdasarkan kebutuhan pasar dan pasokan. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah secara aktif menjalin hubungan langsung dengan petani atau koperasi sebagai pemasok bahan pangan utama, seperti telur dari Blitar, bawang merah dari Nganjuk, dan sayuran dari Mojokerto. Melalui kerja sama tersebut, Surabaya sebagai daerah konsumen dapat memperoleh pasokan bahan pokok secara lebih stabil dan terjangkau. Di sisi lain, daerah produsen mendapatkan akses pasar yang lebih pasti, sehingga turut meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal. Pola distribusi semacam ini sejalan dengan konsep rantai pasok menurut P. Tyagi (2014), yang menekankan pentingnya hubungan terintegrasi antara produsen, distributor, dan konsumen dalam sistem distribusi barang secara efisien. Kerja sama yang mengurangi peran tengkulak atau distributor perantara memungkinkan harga menjadi lebih terkendali, terutama menjelang hari besar seperti Ramadan dan Idulfitri, di mana lonjakan harga umumnya terjadi.

Peran pemerintah daerah dalam konteks ini sangat penting, bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator antar daerah. Pemerintah Kota Surabaya, misalnya, seringkali mengambil inisiatif dalam membangun kerja sama dengan

pemerintah kabupaten sekitar, termasuk menyediakan moda transportasi dan dukungan infrastruktur distribusi. Akan tetapi, kerja sama ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah belum adanya kerangka kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan untuk memformalkan kerja sama antardaerah dalam jangka panjang. Selain itu, perbedaan skala prioritas dan kemampuan fiskal masing-masing daerah kerap menjadi kendala dalam menyamakan visi kerja sama. Di sisi lain, masih terbatasnya sistem informasi pangan yang terintegrasi antar wilayah juga menjadi hambatan. Tanpa data yang akurat dan real-time mengenai pasokan serta permintaan, upaya pengendalian harga kerap bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Meskipun demikian, berbagai inisiatif lokal menunjukkan bahwa sinergi antara daerah produsen dan konsumen dapat memberikan dampak nyata terhadap stabilitas harga bahan pokok, sekaligus mendukung ketahanan pangan regional.

Efektivitas Kerja Sama dalam Stabilitas Harga

Dampak dari kerja sama ini sangat signifikan terhadap stabilitas harga dan pasokan bahan pokok. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Surabaya, fluktuasi harga yang sebelumnya sangat tinggi kini dapat dikendalikan. Sebagai contoh, harga telur pada bulan Ramadhan tahun 2024 stabil di angka Rp 26.000/kg, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 30.000/kg. Disparitas harga antara pasar tradisional dan pasar modern juga menurun dari 15 persen menjadi sekitar 5 persen. Selain itu, kerja sama ini juga menjamin ketersediaan bahan pokok pada saat permintaan tinggi dan musim paceklik. Manfaat lain dari kerja sama ini adalah meningkatnya kesejahteraan petani dan peternak di daerah produsen. Dengan adanya kepastian pasar dan harga yang telah disepakati bersama, para produsen dapat merencanakan produksi dengan lebih baik dan memperoleh pendapatan yang lebih stabil. Ini sejalan dengan konsep distribusi nilai tambah dalam rantai pasok seperti yang dijelaskan oleh Gereffi et al. (2005), di mana setiap pelaku dalam rantai pasok memperoleh manfaat yang adil.

Sistem Rantai Pasok (*Supply Chain*)

Sistem rantai pasok (*supply chain*) dalam kerja sama pangan antardaerah ini menghubungkan wilayah produsen di Nganjuk, Mojokerto, dan Blitar dengan Surabaya sebagai wilayah konsumen utama melalui mekanisme yang terintegrasi. Rantai pasok ini

KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGENDALIAN HARGA BAHAN POKOK: STUDI KASUS SURABAYA DENGAN NGANJUK, MOJOKERTO, DAN BLITAR

dirancang untuk mempersingkat jalur distribusi dari produsen ke konsumen, mengurangi ketergantungan pada perantara, sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok. Struktur utama *supply chain* ini melibatkan petani dan koperasi tani sebagai penyedia utama komoditas spesifik: telur dari Blitar, bawang merah dari Nganjuk, serta sayuran dari Mojokerto. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang menjembatani hubungan antara produsen dan pasar di Surabaya melalui koordinasi teknis dan nota kesepahaman. Distribusi barang dilakukan melalui dua model utama: pengiriman langsung dari petani/koperasi ke pasar tradisional/modern di Surabaya, serta sistem buffer stock untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan.

Tantangan dan Kendala Kerja Sama

Keunggulan model *supply chain* ini terletak pada efisiensi distribusi yang mampu menekan biaya logistik hingga 20-25%, sekaligus meningkatkan margin keuntungan petani sebesar 15-20%. Sistem ini juga dilengkapi dengan mekanisme respons cepat melalui koordinasi antar dinas terkait, meski masih menghadapi keterbatasan dalam hal sistem informasi terpadu dan infrastruktur pendukung seperti cold storage. Tantangan utama yang dihadapi mencakup ketergantungan pada kondisi musim, kapasitas produksi lokal yang terbatas, serta belum optimalnya sistem monitoring stok secara real-time. Berbagai inisiatif pengembangan sedang dilakukan, termasuk digitalisasi rantai pasok dan peningkatan kapasitas logistik, untuk memperkuat keberlanjutan sistem ini di masa depan. Model *supply chain* kolaboratif ini tidak hanya berhasil menstabilkan harga bahan pokok di Surabaya dengan penurunan fluktuasi harga hingga 30%, tetapi juga telah meningkatkan kesejahteraan petani di daerah penyangga melalui jaminan akses pasar yang lebih pasti dan transparan.

Kontribusi terhadap Ketahanan Pangan dan SDGs

Secara keseluruhan, kerja sama antardaerah dalam pengendalian harga bahan pokok tidak hanya memberikan manfaat ekonomis jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kerja sama antar daerah antara Surabaya, Nganjuk, Mojokerto, dan Blitar dalam pengendalian harga bahan pokok menunjukkan efektivitas dalam menciptakan stabilitas harga dan ketahanan pangan lokal. Strategi ini tidak hanya bermanfaat secara ekonomi tetapi juga sosial,

dengan mendorong kesejahteraan petani dan peternak. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam memastikan akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kerja sama antardaerah dalam pengendalian harga bahan pokok di Indonesia, khususnya antara Surabaya dan tiga kabupaten mitra (Nganjuk, Mojokerto, dan Blitar), telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menurunkan fluktuasi harga, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperbaiki kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal. Keberhasilan tersebut didukung oleh mekanisme koordinasi teknis yang dilakukan secara aktif, pengaturan rantai pasok yang terintegrasi, serta hubungan langsung antara produsen dan pasar di Surabaya, sehingga secara bersama-sama berkontribusi terhadap stabilitas harga dan pasokan bahan pokok yang lebih baik. Selain itu, kerja sama ini juga mampu memperkuat keberlanjutan ketahanan pangan regional melalui peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan harga bahan pokok, yang secara langsung berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha di wilayah tersebut.

Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam implementasi kerja sama ini, di antaranya adalah kurangnya kerangka kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan untuk memformalkan dan mengelola kerja sama antardaerah secara jangka panjang. Perbedaan skala prioritas dan kemampuan fiskal masing-masing daerah juga menjadi hambatan dalam menyamakan visi dan tujuan kerja sama, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan serta harmonisasi kebijakan antar wilayah. Selain itu, terbatasnya sistem informasi pangan yang terintegrasi secara efektif di seluruh wilayah menjadi hambatan utama dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Tanpa data yang real-time dan akurat mengenai pasokan serta permintaan, upaya pengendalian harga cenderung bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan, sehingga mengurangi efektivitas dari kerja sama tersebut.

Secara keseluruhan, kolaborasi antardaerah ini menunjukkan bahwa sinergi yang terjalin dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan stabilitas ekonomi regional. Melalui kerja sama ini, efisiensi

KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGENDALIAN HARGA BAHAN POKOK: STUDI KASUS SURABAYA DENGAN NGANJUK, MOJOKERTO, DAN BLITAR

distribusi bahan pokok dapat ditingkatkan, sehingga harga yang lebih stabil dapat tercapai dan disparitas harga antar wilayah dapat diminimalisasi. Lebih jauh lagi, kerja sama ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam memastikan akses pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan. Dengan memperkuat kerangka kelembagaan dan sistem informasi yang terintegrasi, diharapkan kerja sama ini dapat berkembang menjadi model yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan di masa mendatang.

Selain manfaat ekonomi jangka pendek, kerja sama ini juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif, serta memperkuat ketahanan pangan secara nasional. Inisiatif kolaboratif ini menunjukkan bahwa sinergi antar daerah dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok, yang selama ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti gangguan distribusi, fluktuasi pasar global, dan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme kerja sama ini perlu didukung oleh kebijakan yang memadai, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, agar keberlanjutan dan efektivitasnya dapat terus terjaga dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, kerja sama antardaerah dalam pengendalian harga bahan pokok merupakan sebuah inovasi yang penting dan relevan dalam konteks pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Keberhasilannya menunjukkan bahwa kolaborasi lintas wilayah dapat memperkuat posisi daerah dalam mengelola sumber daya dan mengatasi tantangan bersama secara efektif, sehingga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, sistem informasi, serta harmonisasi kebijakan di tingkat daerah menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan dari kerja sama ini di masa mendatang.

Saran

Kerja sama antardaerah antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Nganjuk, Mojokerto, dan Blitar dalam pengendalian harga bahan pokok telah menunjukkan hasil

yang positif, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan produsen lokal. Namun, agar kerja sama ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, pemerintah daerah perlu membangun kerangka kelembagaan yang kuat dan formal sebagai dasar pelaksanaan kerja sama jangka panjang. Selama ini, sebagian besar kerja sama masih bersifat informal dan bergantung pada inisiatif masing-masing pihak. Dengan adanya regulasi atau nota kesepahaman yang lebih mengikat, keberlanjutan kerja sama tidak akan terhambat oleh pergantian kepemimpinan atau perbedaan prioritas pembangunan daerah.

Selanjutnya, sistem informasi pangan yang terintegrasi sangat dibutuhkan agar distribusi bahan pokok dapat direncanakan dan dikendalikan secara lebih akurat. Ketidakterpaduan data antar wilayah menjadi salah satu penyebab pengambilan keputusan yang tidak responsif dan cenderung reaktif. Oleh karena itu, digitalisasi dalam pengelolaan rantai pasok dan penyediaan informasi secara real-time dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat respon terhadap gejolak harga, serta menjamin transparansi dalam distribusi.

Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur logistik harus menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah perlu menyediakan pelatihan bagi petani, koperasi, dan pelaku distribusi mengenai manajemen pasokan, akses pasar, serta pemanfaatan teknologi. Fasilitas pendukung seperti cold storage, gudang distribusi, dan sistem transportasi yang memadai juga akan memperkuat efektivitas kerja sama ini, terutama dalam menghadapi musim paceklik atau lonjakan permintaan.

Kemudian, sinergi antar kebijakan daerah juga penting untuk diperkuat melalui koordinasi lintas wilayah yang lebih terstruktur. Perbedaan kemampuan fiskal dan fokus pembangunan kerap menjadi kendala dalam pelaksanaan program bersama. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah pusat untuk menyediakan insentif kebijakan maupun pembiayaan, sehingga kerja sama ini tidak hanya bergantung pada komitmen satu pihak saja.

Terakhir, keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta dalam kerja sama ini perlu terus didorong. Partisipasi koperasi, UMKM, dan pelaku usaha logistik dapat memperkuat jaringan distribusi, memperluas pasar produsen lokal, serta menciptakan sistem pasok yang lebih adaptif. Sementara itu, edukasi kepada konsumen mengenai

KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGENDALIAN HARGA BAHAN POKOK: STUDI KASUS SURABAYA DENGAN NGANJUK, MOJOKERTO, DAN BLITAR

konsumsi pangan yang bijak juga akan membantu menstabilkan permintaan, terutama saat periode kritis seperti menjelang hari besar.

DAFTAR REFERENSI

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments. Georgetown University Press.
- FAO. (2006). Food security policy brief: Issue 2. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org>
- Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The Governance of Global Value Chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78-104.
- Kominfo Surabaya. (2024). "Surabaya Jalin Kerja Sama Pangan dengan Nganjuk, Mojokerto, dan Blitar."
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Putra, I. (2018). Identifikasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah. *Jurnal Bina Praja*, 113-122.
- Syafii, A., Rachmawati, Y., & Setiawan, M. I. (2020). Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Tyagi, P. (2014). Supply chain integration and logistics management among BRICS: A literature review. *American Journal of Engineering Research (AJER)*, 3(5), 15–24.